

Edisi 13 | 2025

<https://bpkh.go.id/>

BPKH *News*

**Di Balik Angka BPIH 2026:
Menjaga Amanah dan
Keberlanjutan Haji**

Hal 09

**Perpustakaan
Masjidil Haram**

Hal 30

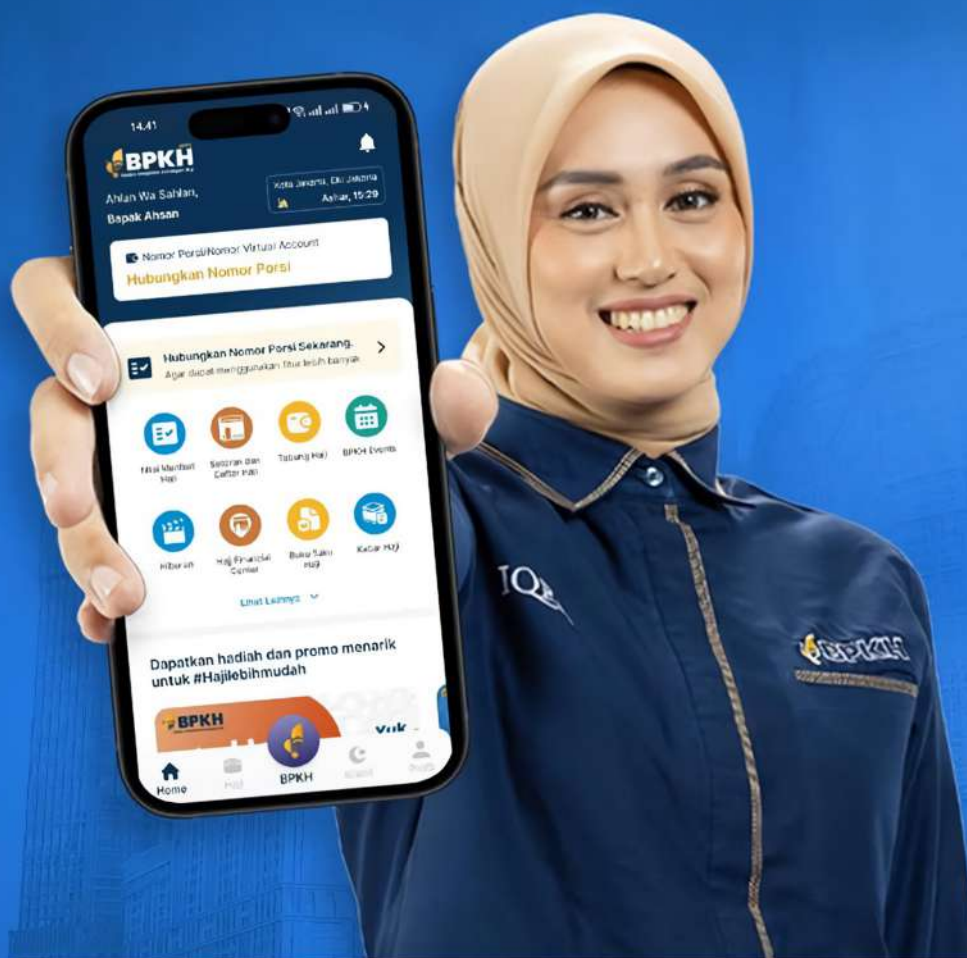
**Delapan Tahun BPKH:
Dana Haji Terus Tumbuh dan
Beri Manfaat Lebih**

Hal 19

**Menghidupkan
"Raksasa Tidur"
Ekonomi Haji**

Hal 27

**BOOSTING TRUST
BUILDING THE FUTURE**



Mau Tahu Estimasi Keberangkatanmu?

Cek estimasi keberangkatan dan nilai manfaat langsung di BPKH Apps.
Satu aplikasi untuk kelola rencana ibadah haji dengan mudah dan transparan.

BPKH Apps



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya, Majalah BPKH kembali hadir menyapa pembaca dengan beragam informasi, refleksi, dan catatan penting mengenai langkah-langkah strategis Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam menjalankan amanah pengelolaan dana haji.

Edisi kali ini merekam dinamika dan ikhtiar BPKH dalam memperkuat tata kelola, memperluas kolaborasi, serta menghadirkan layanan yang semakin adaptif terhadap kebutuhan jemaah dan perkembangan zaman. Sinergi BPKH dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan seluruh kebijakan dan pengelolaan dana haji senantiasa berpijak pada prinsip syariah yang kuat dan kredibel.

Berbagai apresiasi yang diraih BPKH jadi penanda atas upaya berkelanjutan dalam membangun institusi yang profesional, berdaya tahan, dan responsif. Penghargaan tersebut bukan sekadar capaian simbolik, melainkan cerminan dari proses panjang pembenahan tata kelola, komunikasi, dan keberlanjutan yang terus dilakukan.

Pada edisi ini pula, pembaca diajak menelusuri komitmen BPKH dalam mendukung peningkatan layanan haji melalui kerja sama strategis, antara lain penandatanganan nota kesepahaman dengan RUA Al-Haramain dalam pengembangan King Salman Gate, serta penguatan kolaborasi layanan haji digital yang diharapkan mampu menghadirkan pengalaman layanan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

Isu krusial seperti penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan pengelolaan dana haji tetap menjadi perhatian utama. BPKH terus berupaya menjaga keseimbangan antara keberlanjutan dana, nilai manfaat, dan keterjangkauan biaya bagi jemaah, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Kepedulian sosial juga menjadi bagian tak terpisahkan dari peran BPKH. Melalui berbagai program bantuan untuk masyarakat di Aceh dan Sumatra, BPKH menegaskan bahwa pengelolaan dana haji tidak hanya berorientasi pada keberangkatan jemaah, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan.

Ragam perspektif dan refleksi turut dihadirkan melalui Podcast Wakil Menteri, laporan Rapat Kerja (Raker) BPKH, serta peringatan Milad BPKH yang menjadi momentum evaluasi dan penguatan komitmen kelembagaan. Sementara itu, rubrik kapsul waktu e-mag BPKH mengajak pembaca menengok kembali perjalanan satu tahun terakhir—merekam proses, pembelajaran, dan capaian yang membentuk BPKH hari ini.

Puncak dari komitmen tersebut tercermin dalam diraihnya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan kualifikasi Informatif. Predikat ini menegaskan keseriusan BPKH dalam membangun budaya transparansi melalui berbagai inovasi layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan teknologi digital, serta penyajian informasi publik yang mudah diakses dan dipahami masyarakat.

Melalui edisi ini, Tim Redaksi berharap Majalah BPKH tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga ruang dialog, refleksi, dan penguatan kepercayaan publik. Semoga setiap sajian di dalamnya dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai ikhtiar BPKH dalam mengelola amanah dana haji secara aman, hati-hati, syariah, transparan, dan produktif, demi kemaslahatan jemaah dan umat.

Selamat Membaca.

-Tim Redaksi BPKH



PELINDUNG

Fadlul Imansyah,
Kepala Badan Pelaksana BPKH RI
Ahmad Zaky,
Sekretaris Badan BPKH RI

PENANGGUNG JAWAB

Demmy R Budiawan,
Kepala Divisi Komunikasi Strategis
BPKH RI

PEMIMPIN REDAKSI

Ricki Syahroni Putra,
Manajer Komunikasi Strategis BPKH RI

STAF REDAKSI

Yusuf Kadhafi

ALAMAT REDAKSI

Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18,
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12940



**PERKUAT LITERASI KEUANGAN
SYARIAH: BPKH TEGASKAN
SINERGI DENGAN MUI**

1

**BPKH RAIH PENGHARGAAN BEST PR AND
PUBLIC CAMPAIGN DARI PRMN AWARD**

3



**BEST PR AND
PUBLIC CAMPAIGN**
BPKH
**BEST IN CRISIS
COMMUNICATION**

**BPKH RAIH ESG NOW AWARDS 2025,
TEGASKAN KOMITMEN INVESTASI HAJI**



4

**BPKH DAN RUA ALHARAM ALMAKKI
SEPAKAT INVESTASI KING SALMAN GATE**

5



**BPKH DAN BUZZ ARVR KOLABORASI
BIDANG LAYANAN HAJI SECARA DIGITAL**



7



9

**DI BALIK ANGKA
BPIH 2026: MENJAGA
AMANAH DAN
KEBERLANJUTAN HAJI**



MENJAGA BIAYA HAJI

11



13

**SINERGI KEMANUSIAAN:
BPKH SALURKAN RP14,7
MILIAR UNTUK PROGRAM
TANGGAP BENCANA
SUMATERA**



15

**WAKIL MENTERI AGAMA
BEBERKAN CARA
TURUNKAN BIAYA HAJI DAN
TINGKATKAN PELAYANAN**

**KALEIDOSKOP
BPKH 25**



27

**MENGHIDUPKAN
“RAKSASA TIDUR”
EKONOMI HAJI**



**GREEN WAKAF: PERKUAT
EKOSISTEM LINGKUNGAN
DAN EKONOMI UMAT**

29



**PENANDATANGANAN KOMITMEN
KINERJA BPKH TAHUN 2026**
7 Badan Pelaksana BPKH & 13 Deputi BPKH

**DELAPAN TAHUN BPKH:
DANA HAJI TERUS TUMBUH
DAN BERI MANFAAT LEBIH
BESAR**

19



**KIPRAH BPKH DALAM
KOMUNIKASI PUBLIK DAN
KETERBUKAAN INFORMASI**

21

23

**MEWUJUDKAN
TRANSFORMASI BMI SEBAGAI
BANK HAJI: SEBUAH TINJAUAN
KONSEPTUAL**



31

**PERPUSTAKAAN
MASJIDIL HARAM:
WARISAN PERADABAN
ISLAM**

**33 SKEMA PERJALANAN
HAJI 2026**



PERKUAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH: BPKH TEGASKAN SINERGI DENGAN MUI DALAM PENGUKUHAN DA'I STANDARDISASI

*"Dai itu
sebenarnya
al-muslihun,
pembawa
perbaikan.
Perbaikan
itu sifatnya
berkelanjutan,
sustainable."*

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat program literasi keuangan haji dengan melibatkan ribuan dai dari seluruh Indonesia melalui kolaborasi strategis standarisasi dai.

Sebanyak 4.000 dai yang telah lulus standarisasi bertaraf nasional didorong aktif mengedukasi masyarakat tentang tata kelola dana haji dan prinsip-prinsip profesionalitas dakwah.

Wisuda Akbar Standardisasi Dai 2025 dan Halaqah Dakwah yang digelar pada Minggu (2/11/2025) di Jakarta dihadiri oleh Wakil Presiden RI ke-13 sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander, serta Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuhah KH. Kholil Nafis. Dalam sambutannya, Ma'ruf Amin



menyampaikan apresiasi kepada para dai yang telah melalui proses standardisasi dan kini berstatus “dai standar”.

Kiai Ma'ruf menilai, sertifikasi dai menjadi penting agar dakwah Islam berjalan dengan batasan, prinsip, dan tujuan yang jelas. “Saya sampaikan selamat kepada mereka yang diwisuda hari ini, yang tadinya belum standar sekarang menjadi standar. Dulu ada misi sertifikasi, sekarang kita wujudkan agar para dai memiliki dhawabit (batasan-batasan dalam berdakwah),” ujar Kiai Ma'ruf dalam siaran pers yang diterima pada Selasa (4/11/2025).

Kiai Ma'ruf menjelaskan seorang dai tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga harus membawa kemaslahatan bagi umat. Dia menyebut dai sejatinya adalah al-muslihun (para pembawa perbaikan). “Dai itu sebenarnya al-muslihun, pembawa perbaikan. Perbaikan itu sifatnya berkelanjutan, sustainable. Maka saya membuat satu paradigma: al-islah tsumma al-ashlah fal-ashlah (melakukan perbaikan secara terus-menerus),” tuturnya.

Sementara pada kesempatan yang sama Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menyampaikan pentingnya peran dai dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan dana haji.

“Para dai memiliki posisi strategis dalam menyampaikan pesan keumatan. Dengan pemahaman yang kuat tentang keuangan haji, mereka dapat menjadi garda depan dalam memberikan literasi yang benar kepada calon jemaah dan masyarakat luas,” ujar Harry Alexander.

Program dakwah tematik yang diluncurkan MUI bersama mitra strategis seperti Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Bank Syariah Indonesia, BSI Maslahat, dan BPKH, menjadi langkah nyata memperkuat sinergi antar-lembaga dalam membangun kesadaran ekonomi umat.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan pesan dakwah dapat lebih kontekstual, produktif, dan relevan dengan tantangan ekonomi syariah masa kini. Selain itu, dalam acara Wisuda Akbar Standardisasi

MUI telah dikukuhkan oleh Ketua MUI Komisi Dakwah dan Ukhuwah KH Cholil Nafis.

Para dai tersebut diharapkan menjadi pelopor dakwah profesional yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga memiliki daya sosial dan ekonomi yang kuat. BPKH menilai, langkah ini sejalan dengan visi lembaga untuk memperkuat ekosistem keuangan haji dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dana umat.

“Literasi keuangan haji bukan hanya soal pemahaman teknis, tetapi juga tentang bagaimana umat dapat merasa memiliki dan percaya terhadap tata kelola dana haji yang dilakukan secara amanah dan transparan,” tutup Harry Alexander.

Dai MUI Tahun 2025, lebih dari 4.000 dai berstandar





BPKH RAIH PENGHARGAAN BEST PR AND PUBLIC CAMPAIGN DARI PRMN AWARD

Saat krisis komunikasi jemaah haji pasca-Armuzna terjadi, BPKH membuktikan diri sebagai lembaga yang sigap, responsif, dan mengutamakan keterbukaan informasi kepada jamaah dan masyarakat Indonesia. Penghargaan ini menjadi validasi bahwa langkah yang ditempuh berada di jalur yang benar.

Ini juga menjadi bukti nyata bahwa transparansi dan keterbukaan informasi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan umat.

Kepercayaan umat adalah mata uang yang paling berharga. Dengan apresiasi ini, BPKH semakin memantapkan usia ke-8 BPKH hari ini, 12 Desember 2025 dengan semangat baru untuk menjaga amanah yang lebih baik dari sebelumnya.



Semua BisaHaji

80 Berasata Berimadad
sahaja Saiklana
Indonesia Haji

BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji

Nilai Manfaat Tahun 2025 Sudah Didistribusikan!

BPKH sudah mendistribusikan nilai manfaat tahap pertama tahun 2025 untuk Jemaah Tunggu

Nilai manfaat dan saldo dana haji dapat di cek melalui BPKH Apps

Download BPKH Apps segera!

[@bpkhi](#)

www.bpkh.go.id

BPKH RAIH ESG NOW AWARDS 2025, TEGASKAN KOMITMEN INVESTASI HAJI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali meraih pengakuan nasional dengan memperoleh ESG Now Awards 2025 untuk kategori Sustainable Investment Initiative pada pilar Tata Kelola. Penghargaan ini menjadi capaian kedua secara berturut-turut setelah BPKH sebelumnya menerima ESG Award pada 2024, sekaligus menegaskan konsistensi BPKH dalam menerapkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam pengelolaan dana haji.

ESG Now Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Republika memberikan apresiasi kepada organisasi di 15 kategori ESG melalui proses penilaian ketat berbasis analisis data, verifikasi fakta, dan pengukuran dampak



nyata. Dalam kategori tersebut, BPKH dinilai unggul melalui inovasi pengembangan instrumen keuangan syariah berkelanjutan berupa Green Sukuk, Blue Sukuk, dan Orange Sukuk.

Ketiga instrumen ini tidak hanya berorientasi pada kinerja komersial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan lingkungan yang terukur, mulai dari konservasi lingkungan, pemberdayaan UMKM perempuan, hingga kontribusi terhadap penurunan emisi karbon nasional. Kehadiran Orange Sukuk menjadi inovasi yang menonjol karena secara khusus dirancang untuk mendorong pemberdayaan UMKM perempuan dan investasi syariah yang inklusif.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa Green, Blue, dan Orange Sukuk merupakan wujud komitmen BPKH dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, dan aksi iklim.

Melalui capaian ini, BPKH semakin menegaskan perannya sebagai lembaga pengelola dana haji yang amanah, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang demi kemaslahatan umat.



Kamu udah download BPKH Apps belum?

Cek saldo dan pertumbuhan nilai manfaat kamu hanya di BPKH Apps!

BPKH Apps • Edisi 13 • November 2025

9:41

Seribu, Jakarta Selatan
Maghrib, 11:53 WIB

Saldo Keuangan Haji
Rp25.465.000

Nomor Virtual Account: 1581025180001009
Nomor Pensi: 4000867730

Udah Lainnya

BPKH APPS

GET IT ON Google Play

Download on the App Store



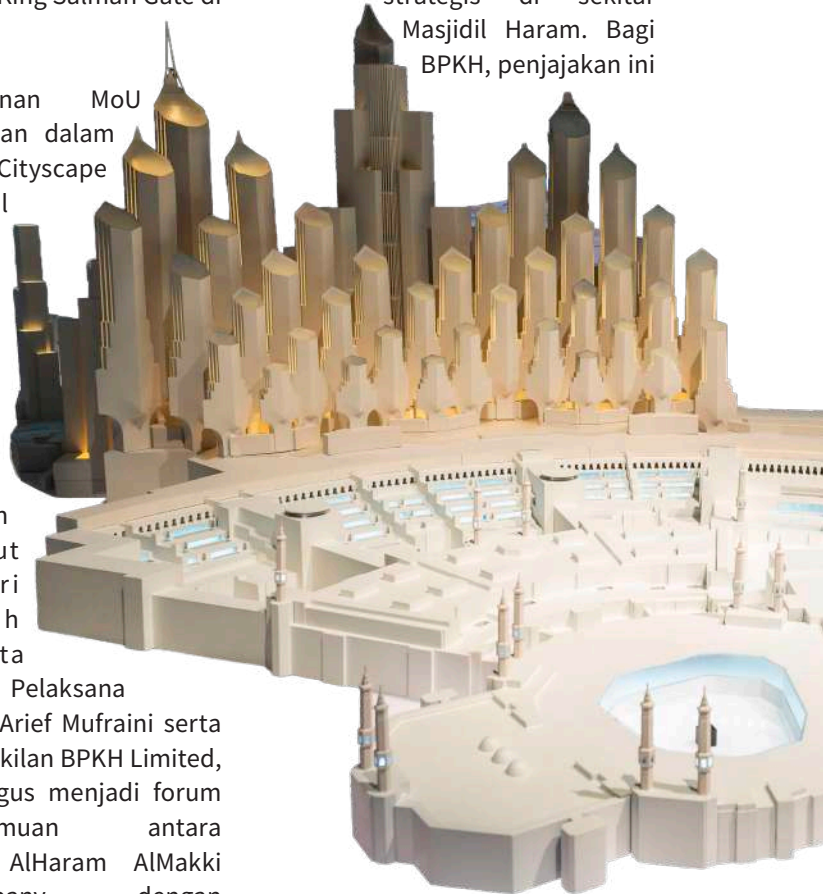
BPKH DAN RUA ALHARAM ALMAKKI SEPAKAT INVESTASI KING SALMAN GATE

Dalam menjalankan mandat pengelolaan keuangan haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus berupaya memastikan bahwa dana umat dikelola secara aman, produktif, dan memberikan nilai manfaat berkelanjutan bagi jamaah. Sejalan dengan komitmen tersebut, BPKH menjajaki peluang kerja sama investasi strategis di Arab Saudi melalui penandatanganan dua Nota Kesepahaman (MoU) dengan RUA AlHaram

AlMakki Company, pengembang utama proyek King Salman Gate di Kota Makkah.

Penandatanganan MoU ini dilaksanakan dalam rangkaian Cityscape Global 2025 yang berlangsung di Riyadh pada 17-19 Oktober 2025.

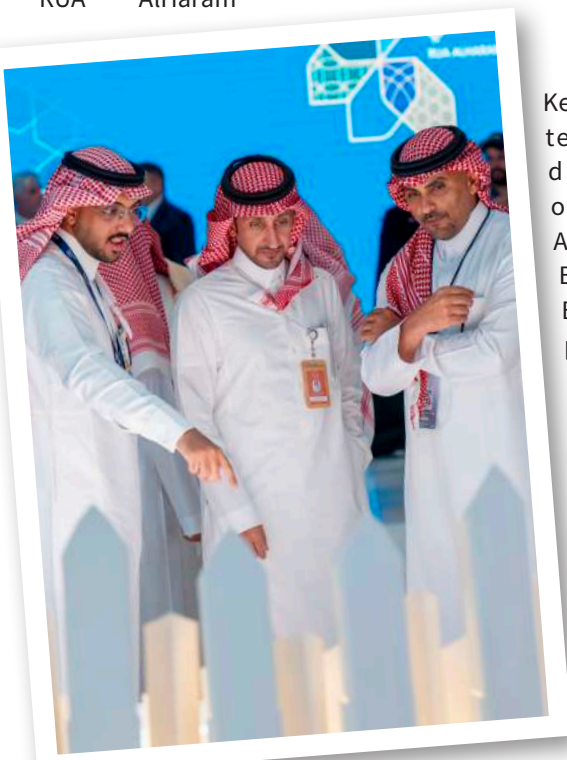
dalam pengembangan kawasan strategis di sekitar Masjidil Haram. Bagi BPKH, peninjauan ini



Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Badan Pelaksana BPKH Arief Mufraini serta perwakilan BPKH Limited, sekaligus menjadi forum pertemuan antara RUA AlHaram AlMakki Company dengan investor internasional, mitra institusional, dan media global.

Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat sinergi Indonesia-Arab Saudi

merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama internasional yang berpotensi memberikan nilai tambah langsung bagi jamaah haji dan umrah, sekaligus mendukung visi jangka panjang pembangunan Arab Saudi dalam kerangka *Vision*



2030 dan Pilgrim Experience Program.

MoU pertama menetapkan kerangka kerja sama strategis di bidang investasi pada proyek King Salman Gate. Kedua belah pihak sepakat untuk mengeksplorasi berbagai peluang investasi, termasuk pengembangan properti bersama, akuisisi lahan, serta partisipasi dalam produk investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan kawasan Makkah secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga karakter dan nilai-nilai Kota Suci.

Proyek King Salman Gate sendiri merupakan kawasan pengembangan multifungsi berskala besar di sekitar Masjidil Haram, dengan luas

and beverage/F&B) di kawasan King Salman Gate. Melalui kerja sama ini, para pihak akan mengeksplorasi pengembangan layanan F&B yang beragam dan terjangkau, dengan menghadirkan pilihan kuliner yang mencerminkan keberagaman komunitas Muslim dunia. Inisiatif ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kenyamanan jamaah, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta membuka peluang bagi pelaku usaha lokal dan internasional.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa peninjauan kerja sama investasi ini merupakan langkah strategis dalam memperluas ruang manfaat pengelolaan dana haji. Menurutnya, keterlibatan BPKH dalam proyek King Salman Gate membuka peluang bagi optimalisasi investasi yang memiliki kedekatan langsung dengan kebutuhan jamaah haji dan umrah, sekaligus memperkuat kolaborasi global BPKH di ekosistem haji.

Lebih lanjut, kerja sama ini mencerminkan peran aktif BPKH sebagai lembaga pengelola keuangan haji dalam mendukung pembangunan ekosistem haji global yang terintegrasi. Kolaborasi dengan mitra internasional yang kredibel diharapkan dapat membuka ruang inovasi dalam penyediaan layanan dan fasilitas, sehingga pengalaman ibadah jamaah Indonesia di Tanah Suci dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

Melalui pendekatan kolaboratif dan berlandaskan prinsip kehati-hatian, BPKH dan RUA AlHaram AlMakki Company menegaskan

komitmen bersama dalam melayani jamaah, memperkuat pemberdayaan pelaku usaha, serta mendukung pengembangan Kota Makkah sebagai pusat keimanan dan peradaban dunia.

Sinergi ini menjadi bagian dari ikhtiar jangka panjang BPKH untuk menjaga amanah umat dan memastikan bahwa pengelolaan dana haji memberikan manfaat yang nyata, terukur, dan berkelanjutan bagi jamaah Indonesia.

pengembangan lebih dari 12 juta meter persegi. Kawasan ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas infrastruktur, serta layanan bagi jamaah. RUA AlHaram AlMakki Company sebagai pengembang utama menempatkan kenyamanan jamaah dan pelestarian nilai kesucian Makkah sebagai fokus utama dalam setiap tahap pengembangan.

MoU kedua menggariskan peninjauan kemitraan di sektor makanan dan minuman (*food*





BPKH DAN BUZZ ARVR KOLABORASI BIDANG LAYANAN HAJI SECARA DIGITAL

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperkuat langkah transformasi digital dalam pengelolaan ekosistem haji Indonesia. Salah satu upaya strategis tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Buzz ARVR, perusahaan teknologi imersif yang mengembangkan solusi berbasis *Augmented Reality (AR)*, *Virtual Reality (VR)*, dan *Artificial Intelligence (AI)*.

Kolaborasi ini mencerminkan komitmen BPKH dalam menghadirkan inovasi layanan yang adaptif terhadap kebutuhan jamaah di era digital, sekaligus mendukung visi lembaga sebagai pengelola dana haji yang terpercaya, modern, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan ibadah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menegaskan bahwa kerja sama ini tidak sekadar menghadirkan teknologi baru, melainkan bertujuan memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, terarah, dan aman bagi jamaah haji dan umrah. "Kolaborasi ini menjadi langkah nyata dalam menghadirkan pengalaman beribadah yang

lebih tenang dan terarah melalui teknologi digital yang aman dan bermanfaat," ujar Harry dalam keterangannya.

Melalui pemanfaatan teknologi imersif, BPKH melihat peluang besar untuk menyediakan layanan digital yang dapat mendampingi jamaah selama berada di Tanah Suci. Layanan ini dirancang untuk membantu jamaah dalam menavigasi lokasi, memahami alur perjalanan, serta memperoleh panduan tata cara ibadah secara interaktif. Kehadiran panduan digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa aman dan

kenyamanan jamaah, khususnya bagi mereka yang pertama kali menunaikan ibadah haji.



Harry menjelaskan bahwa inisiatif ini juga menjadi bagian dari percepatan transformasi digital dalam tata kelola ekosistem haji secara keseluruhan. “Layanan digital ini tidak hanya memberikan kemudahan akses informasi bagi jamaah, tetapi juga mendukung visi BPKH dalam membangun sistem pengelolaan haji yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan,” ujarnya.

Teknologi yang dikembangkan Buzz ARVR dirancang berperan layaknya asisten virtual yang menemani jamaah selama menjalankan ibadah. Dengan dukungan AR, VR, dan AI, jamaah dapat memperoleh panduan real-time terkait lokasi penting, fasilitas pendukung, hingga pemahaman ritual ibadah melalui visualisasi interaktif. Pendekatan ini memungkinkan jamaah mengoptimalkan waktu ibadah, mengurangi risiko tersesat, serta meningkatkan pemahaman terhadap prosedur ibadah secara lebih mudah dan informatif.

CEO Buzz ARVR, Beh Ee Ling, menyampaikan bahwa kerja sama dengan BPKH membuka peluang pemanfaatan teknologi imersif yang memiliki nilai sosial dan spiritual. Menurutnya, teknologi tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga dapat menjadi alat yang mendukung kekhayalan dan kenyamanan dalam beribadah.

“Teknologi ARVR dan AI kami akan berperan layaknya asisten virtual yang menemani jamaah selama menjalankan ibadah, membantu mereka menavigasi lokasi, memahami ritual, dan mengakses informasi penting dengan mudah,” ujar Beh Ee Ling.

Lebih jauh, Beh Ee Ling menekankan bahwa visualisasi interaktif yang dihadirkan melalui teknologi imersif dapat membantu jamaah memahami konteks ritual, urutan ibadah, serta makna setiap tahapan dengan lebih baik. Dengan demikian, pengalaman spiritual jamaah diharapkan menjadi lebih mendalam dan terarah.

Bagi jamaah, kehadiran layanan digital ini memberikan sejumlah manfaat nyata. Mulai dari kemudahan memperoleh informasi yang relevan, peningkatan rasa aman selama beraktivitas di Tanah Suci, hingga pengalaman ibadah yang lebih fokus dan terstruktur. Pendampingan digital ini menjadi solusi inovatif dalam menjawab tantangan kompleksitas pelaksanaan ibadah haji di tengah jumlah jamaah yang besar dan dinamika lingkungan yang terus berkembang.

Kolaborasi BPKH dan Buzz ARVR menandai langkah awal pengembangan layanan teknologi yang lebih luas dalam ekosistem haji. Inisiatif ini diharapkan dapat membuka peluang pengembangan solusi digital lainnya yang mendukung efisiensi operasional, transparansi pengelolaan dana, serta peningkatan kualitas layanan jamaah di masa mendatang.

Melalui sinergi antara teknologi dan nilai spiritual, BPKH menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan haji yang modern, aman, dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah.

Transformasi digital ini menjadi bagian dari ikhtiar berkelanjutan BPKH dalam menjaga amanah umat dan memastikan pengalaman ibadah haji dan umrah yang semakin nyaman, terarah, dan berkesan.

DI BALIK ANGKA BPIH 2026: MENJAGA AMANAH DAN KEBERLANJUTAN HAJI

Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447H/2026M sebesar Rp87,4 juta menjadi langkah penting dalam menjaga keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji. BPKH menegaskan kesiapan menyalurkan Nilai Manfaat secara aman dan akuntabel demi kualitas layanan ibadah haji.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyambut baik penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1447H/2026M yang telah disepakati Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI bersama Panja Pemerintah pada 29 Oktober 2025. Total BPIH yang ditetapkan sebesar Rp87,4 juta, lebih rendah sekitar Rp2 juta dibandingkan BPIH tahun 2025, dan dinilai mencerminkan upaya efisiensi bersama yang terukur dan bertanggung jawab.

Di tengah tantangan biaya operasional global dan kompleksitas penyelenggaraan haji, keputusan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan DPR dalam menjaga keterjangkauan biaya bagi jemaah, sekaligus memastikan keberlanjutan sistem keuangan haji.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan apresiasinya atas keputusan tersebut.

Menurutnya, penurunan biaya ini merupakan hasil kerja keras dan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah bersama DPR dalam meninjau berbagai komponen biaya haji. “BPIH 2026 yang telah disepakati mencerminkan keseimbangan antara kemampuan jemaah dengan pengelolaan nilai manfaat dana haji yang optimal,” ujarnya.

Sesuai dengan mandatnya sebagai pengelola keuangan haji, BPKH menegaskan kesiapan untuk menyalurkan Nilai Manfaat guna melengkapi biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Berdasarkan kesepakatan, rata-rata Bipih per jemaah ditetapkan sebesar Rp54.193.806,58 atau sekitar 62 persen, sementara porsi Nilai Manfaat mencapai Rp33.215.558,87 atau sekitar 38 persen dari total BPIH.





“BPKH berkomitmen penuh mendukung keputusan ini. Kami memastikan ketersediaan dana Nilai Manfaat dari hasil investasi dana haji yang kami kelola dalam kondisi aman dan siap digunakan sesuai porsi yang telah disepakati,” tegas Fadlul.

Dari sisi tata kelola dan administrasi, Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menjelaskan bahwa BPKH siap mengeksekusi penyaluran dana setelah proses penetapan formal selesai. Selanjutnya, besaran BPIH akan diajukan secara resmi oleh Kementerian Haji dan Umrah RI kepada BPKH, dan penyaluran dana dilakukan ke rekening satuan kerja penyelenggara ibadah haji sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagi BPKH, efisiensi dan rasionalisasi biaya merupakan kunci dalam menjaga dua prinsip utama pengelolaan keuangan haji, yakni keadilan dan keberlanjutan. Penurunan biaya ini tidak hanya meringankan beban jemaah yang berangkat pada 2026, tetapi juga penting untuk memastikan bahwa penggunaan Nilai Manfaat tetap terukur, sehingga hak-hak jemaah dalam daftar tunggu dapat terjamin di masa mendatang.

Menutup pernyataannya, Fadlul menegaskan komitmen kelembagaan BPKH untuk

mendukung penuh kebijakan ini. BPKH berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana haji, menyediakan dukungan pendanaan yang tepat waktu, serta bersinergi dengan Kementerian Haji dan Umrah dan seluruh pemangku kepentingan demi terselenggaranya ibadah haji yang aman, lancar, dan maslahat bagi umat.



MENJAGA BIAYA HAJI

agar biaya haji tetap berada pada tingkat yang terjangkau, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan keuangan haji.

BPIH 2026: Hasil Sinergi dan Pengelolaan yang Berkelanjutan

Pada 29 Oktober 2025, Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menetapkan BPIH 2026 sebesar Rp87,4 juta per jemaah, turun Rp2 juta dibandingkan BPIH 2025 yang sebesar Rp89,4 juta. Penurunan ini merupakan hasil pembahasan intensif antara DPR RI, pemerintah, dan BPKH sebagai pengelola dana haji.

Dari total BPIH tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh jemaah ditetapkan sebesar Rp54,2 juta atau sekitar 62 persen. Sementara itu, sebesar 38 persen atau Rp33,2 juta per jemaah ditopang melalui nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji oleh BPKH.

Skema ini mencerminkan prinsip keadilan antargenerasi, di mana jemaah yang berangkat memperoleh dukungan dari hasil pengembangan dana yang dikumpulkan selama masa tunggu. Dengan demikian, dana setoran jemaah tidak hanya aman, tetapi juga produktif dan memberikan manfaat nyata.

Penguatan Peran BPKH dalam Tata Kelola Haji

Transformasi tata kelola haji nasional melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah semakin menegaskan posisi strategis BPKH. Jika sebelumnya BPKH kerap dipersepsikan sebatas sebagai pelaksana pembayaran, kini perannya diperluas secara signifikan.

Dalam regulasi terbaru tersebut, BPKH dilibatkan secara langsung dalam proses penetapan BPIH bersama Menteri Haji dan Umrah serta DPR RI. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah,

Komitmen Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan ibadah haji kembali membuahkan hasil nyata. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya menjadi bukti konkret bagaimana pengelolaan dana haji yang prudent dan berkelanjutan dapat memberikan manfaat langsung bagi jemaah.

Hingga Oktober 2025, dana kelolaan BPKH tercatat mencapai Rp176,3 triliun, tumbuh signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp167,9 triliun. Dana ini berasal dari setoran awal jemaah haji yang kemudian dikembangkan melalui berbagai instrumen investasi syariah untuk menghasilkan nilai manfaat. Nilai manfaat inilah yang berperan strategis dalam meringankan beban biaya pelunasan haji sekaligus menopang kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan.

Melalui pengelolaan dana yang optimal, aman, dan berorientasi jangka panjang, BPKH turut memastikan

“Nilai manfaat bukan sekadar subsidi biaya, tetapi instrumen keadilan antargenerasi dalam penyelenggaraan ibadah haji.”



menegaskan bahwa perubahan regulasi ini menandai babak baru penguatan fungsi BPKH dalam ekosistem haji nasional.

“BPKH tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi ikut terlibat dalam pembentukan kebijakan BPIH. Ini merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang semakin besar,” ujarnya dalam sebuah diskusi publik.

Penguatan peran ini juga mendapat dukungan luas dari para pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi dan organisasi kemasyarakatan Islam. Mereka menilai keterlibatan BPKH dalam penetapan BPIH sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan biaya haji disusun secara komprehensif, berbasis data, dan mempertimbangkan keberlanjutan dana umat.

Menjaga Amanah Dana Umat

Sebagai pengelola dana haji, BPKH mengemban mandat moral yang tinggi. Prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap syariah menjadi landasan utama dalam setiap keputusan investasi. Risiko dijaga tetap rendah, namun nilai manfaat diupayakan optimal agar dapat dirasakan oleh seluruh jemaah, baik yang berangkat

maupun yang masih menunggu.

Dukungan terhadap pemisahan fungsi pengelolaan keuangan dan operasional penyelenggaraan haji juga terus menguat. Pemisahan ini dinilai penting untuk menjaga independensi BPKH serta meminimalkan potensi konflik kepentingan, sehingga pengelolaan dana haji dapat berlangsung secara profesional dan berintegritas.

Nilai Manfaat Siap Menopang Penyelenggaraan Haji 2026

Menanggapi penurunan BPIH 2026, BPKH memastikan kesiapan penyaluran nilai manfaat sesuai dengan porsi yang telah disepakati. “Kami memastikan bahwa dana nilai manfaat dari hasil investasi dana haji dalam kondisi aman dan siap digunakan untuk menopang biaya haji,” ujar Fadlul Imansyah.

Lebih dari sekadar meringankan beban jemaah yang akan berangkat, kebijakan ini juga berperan penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan haji jangka panjang. Penggunaan nilai manfaat yang terukur memastikan hak jemaah yang masih berada dalam antrean tetap terlindungi di masa mendatang.

Penyaluran dana BPIH akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan melalui rekening satuan kerja penyelenggara ibadah haji yang ditetapkan oleh Kementerian Haji dan Umrah. Dalam proses ini, BPKH terus memperkuat sinergi dengan Kemenhaj serta seluruh pemangku kepentingan untuk menjamin keamanan, kelancaran, dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Melalui pengelolaan dana yang amanah dan berkelanjutan, BPKH terus berupaya hadir sebagai penjaga kepercayaan umat, mengelola dana haji hari ini untuk keberangkatan yang lebih adil dan berkualitas di masa depan.





SINERGI KEMANUSIAAN: BPKH SALURKAN RP14,7 MILIAR UNTUK PROGRAM TANGGAP BENCANA SUMATERA

Sebagai wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial bagi masyarakat, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Program Kemaslahatan telah menyalurkan bantuan tanggap bencana senilai Rp14,7 miliar. Langkah ini diambil sebagai respons cepat untuk mengakselerasi penanganan dampak banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera dalam beberapa pekan terakhir.

Bantuan tersebut disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Kuat Bersama: "Dari Tanggap Darurat menuju Bangkit Berkelanjutan" yang digelar di Jakarta, Senin (22/12). Penyaluran bantuan difokuskan pada tiga provinsi yang terdampak paling signifikan, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Amanah untuk Umat di Tengah Ujian

Bencana yang melanda 52 kabupaten/kota ini telah menyisakan duka mendalam. Mengacu pada data Dashboard BNPB per 22 Desember 2025, tercatat 1.090 jiwa meninggal dunia, 186 orang hilang, serta ribuan

warga mengalami luka-luka. Kerusakan infrastruktur pun masif, mencakup lebih dari 147 ribu rumah warga serta ratusan fasilitas pendidikan dan rumah ibadah.



"Bantuan ini adalah amanah dari umat untuk umat. Melalui Program Kemaslahatan, kami mengalokasikan nilai manfaat dari hasil pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) untuk memastikan saudara-saudara kita di Sumatera tidak berjuang sendirian.



Kami ingin hadir di tengah mereka untuk membantu mereka bangkit lebih kuat," ungkap Sulistyowati.

Penyaluran Komprehensif: Dari Logistik hingga Rehabilitasi

Untuk memastikan efektivitas di lapangan, BPKH telah memetakan distribusi bantuan yang mencakup 24

program tanggap bencana ke dalam tiga pilar utama:

- **Penyelamatan dan Logistik Dasar:** Pendistribusian sembako, paket kebersihan (hygiene kit), perlengkapan bayi, serta kebutuhan sandang seperti tikar dan selimut bagi para pengungsi.
- **Dukungan Operasional Lapangan:** Penyediaan dapur umum yang higienis, alat kebersihan, serta akses air bersih sebagai kebutuhan vital di lokasi bencana.
- **Pemulihan Pasca-Bencana:** Fokus pada keberlanjutan masa depan masyarakat melalui dukungan pendidikan dan rehabilitasi fisik bangunan sekolah serta masjid yang mengalami kerusakan.

Sinergi untuk Akuntabilitas

Dalam mengimplementasikan langkah strategis ini, BPKH mengedepankan prinsip kolaborasi dan transparansi dengan menggandeng 7 Mitra Kemaslahatan yang memiliki rekam jejak kuat di lapangan, seperti BAZNAS, Baitulmaal Muamalat (BMM), Dompot Dhuafa, Rumah Zakat, LAZISMU, NU Care-LAZISNU, dan Daarul Qur'an.

Sinergi ini memastikan bahwa bantuan mengalir secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

"Kami berharap kolaborasi ini menjadi fondasi awal bagi pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan gotong royong, kita optimistis Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan segera pulih," tutup Sulistyowati.



WAKIL MENTERI AGAMA BEBERKAN CARA TURUNKAN BIAYA HAJI DAN TINGKATKAN PELAYANAN

Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia menghadapi tantangan kompleks: biaya yang terus menjadi sorotan publik, kualitas pelayanan yang dituntut semakin baik, serta antrean keberangkatan yang kian panjang. Dalam podcast bersama Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Wakil Menteri Agama RI Romo Muhammad Syafi'i memaparkan pandangannya mengenai strategi menurunkan biaya haji tanpa mengorbankan mutu pelayanan.

Romo menjabarkan bahwa penurunan biaya haji tidak otomatis menurunkan kualitas layanan. Menurutnya, terdapat sejumlah komponen pembiayaan yang dapat dioptimalkan secara terpisah tanpa berdampak langsung pada layanan utama jamaah.

Salah satu kuncinya adalah menciptakan persaingan sehat antarvendor. Dalam pengadaan layanan, termasuk transportasi dan layanan penunjang di

Arab Saudi, Indonesia sejatinya memiliki posisi tawar yang sangat kuat. Dengan jumlah jamaah terbesar di dunia, banyak penyedia layanan internasional justru berlomba untuk melayani haji Indonesia. "Kalau persaingan dibuka, vendor akan adu layanan dan harga. Ini hukum pasar," jelasnya.

Sebagai contoh konkret, Romo menyinggung kebijakan penyediaan layanan komunikasi jamaah. Jika sebelumnya hanya dikelola satu vendor dengan biaya tinggi, kini dibuka untuk beberapa penyedia, sehingga harga dapat ditekan secara signifikan tanpa menurunkan kualitas layanan.

Selain persaingan vendor, Romo menyoroti potensi efisiensi anggaran yang masih besar dalam penyelenggaraan haji. Data menunjukkan adanya selisih signifikan antara nilai kontrak dan realisasi pelaksanaan layanan haji yang menghasilkan efisiensi hingga triliunan rupiah dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, fakta ini menunjukkan masih adanya ruang untuk menurunkan biaya haji agar semakin mendekati harga riil yang wajar. "Kalau efisiensi masih besar, berarti masih ada ruang rasionalisasi biaya," ujarnya.

Romo menyampaikan bahwa arahan Presiden sangat jelas, yakni biaya haji harus terus diupayakan agar semakin terjangkau, kualitas pelayanan kepada jamaah harus

Penurunan biaya haji tidak otomatis menurunkan kualitas pelayanan. Yang dibutuhkan adalah efisiensi dan tata kelola yang benar.

ditingkatkan, serta sistem antrean haji perlu direvisi secara menyeluruh dan sistemik. Menurutnya, ketiga tujuan tersebut harus dijalankan secara bersamaan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena

Yang harus dibuktikan adalah bahwa di tangan BPKH, dana jamaah bisa berkembang dan memberi manfaat lebih besar.

penurunan biaya tanpa perbaikan layanan tidak akan memberikan manfaat optimal, begitu pula peningkatan layanan tanpa pengendalian biaya yang berkelanjutan.

Peran Strategis BPKH dalam Ekosistem Haji

Dalam konteks pembiayaan, Romo menilai peran BPKH sangat strategis karena mengelola dana umat dalam jumlah besar. Ia menekankan pentingnya pengelolaan dana haji yang produktif, aman, dan transparan, sehingga hasil pengembangannya benar-benar memberi manfaat bagi jamaah.

Romo berpandangan bahwa jika dana haji mampu dikelola dan diinvestasikan dengan baik oleh BPKH, maka beban biaya jamaah di masa depan dapat semakin berkurang. “yang penting dibuktikan adalah di tangan BPKH, dana jamaah bisa berkembang dan memberi manfaat lebih besar,” tegasnya.

Ia juga mendorong BPKH untuk semakin aktif masuk dalam ekosistem layanan haji, seperti akomodasi, katering, dan layanan pendukung di Arab Saudi, dengan perhitungan yang matang dan tata kelola yang akuntabel. Langkah ini dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga membuka peluang efisiensi biaya jangka panjang.

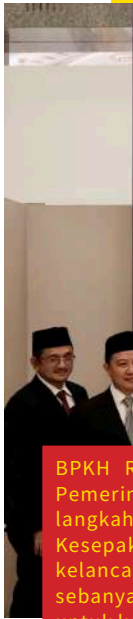
Ke depan, Romo menekankan pentingnya sinergi erat antara Kementerian Agama, BPKH, dan Badan Penyelenggara Haji. Menurutnya, tantangan haji tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja, melainkan melalui perencanaan terpadu yang berbasis data, simulasi keuangan, dan kepastian regulasi.

Dengan sinergi yang kuat, ia optimistis cita-cita besar penyelenggaraan haji Indonesia, dimana biaya lebih ringan, pelayanan lebih bermutu, dan sistem yang berkeadilan bagi jamaah bisa diwujudkan.

**Dr. K.H. Romo
R. Muhammad
Syafi'i, S.H.,
M.Hum**

KALEIDOSKOP BPKH 25

BPKH SAMBUT BAIK MOU HAJI 2025



BPKH RI menyambut baik penandatanganan MoU perhajian antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi di Jeddah sebagai langkah strategis persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Kesepakatan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam menjamin kelancaran dan kenyamanan jemaah haji Indonesia, dengan kuota sebanyak 221 ribu orang serta penggunaan Bandara Madinah dan Jeddah untuk keberangkatan dan kepulangan. Kehadiran BPKH dalam agenda ini menegaskan perannya dalam mendukung peningkatan kualitas layanan haji melalui sinergi lintas pemangku kepentingan.



JANUARI-FEBRUARI

BPKH menggelar pertemuan strategis dengan PBNU di Jakarta sebagai upaya memperkuat



transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan haji. Pertemuan ini membahas kolaborasi kelembagaan, dukungan PBNU terhadap revisi regulasi pengelolaan keuangan haji, serta rencana penyusunan MoU yang mencakup literasi keuangan haji, riset, fatwa, dan pemberdayaan umat, sebagai langkah konkret mewujudkan tata kelola keuangan haji yang lebih profesional dan berpihak pada jemaah.



2.500 PEMUDIK BALIK KERJA BARENG BPKH

MARET-APRIL

BPKH kembali menyelenggarakan Program Kemaslahatan Balik Kerja Bareng BPKH 2025 sebagai bagian dari rangkaian Berkah Ramadhan 1446 H/2025 M untuk membantu masyarakat kembali ke tempat kerja usai Idulfitri. Memasuki tahun ketiga, program ini memberangkatkan sekitar 2.500 peserta dengan 58 bus eksekutif dari lima provinsi menuju wilayah Jabodetabek, didukung hasil pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) serta kolaborasi mitra kemaslahatan, sebagai wujud nyata komitmen BPKH dalam menghadirkan manfaat sosial bagi umat.



MEI-JUNI

**DARI BUMBU NUSANTARA
HINGGA HOTEL EKSKLUSIF**

BPKH menghadirkan sejumlah terobosan strategis pada penyelenggaraan haji 2025 melalui BPKH Limited untuk meningkatkan kualitas layanan jemaah, mencakup peningkatan cita rasa makanan dengan suplai 475 ton bumbu nusantara, penyediaan hotel khusus jemaah Indonesia di Mekah dan Madinah, distribusi makanan siap saji pada puncak Armuzna, serta pembukaan area komersial hotel bagi UMKM Indonesia. Inisiatif ini menegaskan komitmen BPKH dalam menghadirkan pelayanan haji yang profesional, bermartabat, dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah sekaligus pemberdayaan ekonomi umat.

JULI-AGUSTUS

**TUJUH KALI BERTURUT
RAIH WTP BPK**



BPKH kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk ketujuh kalinya berturut-turut atas laporan keuangan 2024, menegaskan konsistensi pengelolaan dana haji yang transparan, akuntabel, dan berbasis syariah. Sepanjang 2024, dana kelolaan BPKH mencapai Rp171,64 triliun dengan nilai manfaat Rp11,54 triliun dan yield 6,97 persen, melampaui target serta memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan ibadah haji dan kemaslahatan umat.

SEPTEMBER-OKTOBER

**PERKUAT SINERGI: BPKH AUDIENSI
DENGAN KEMENTERIAN
HAJI DAN UMROH**

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dipandang BPKH sebagai momentum strategis untuk memperkuat sinergi kelembagaan dan menata penyelenggaraan ibadah haji agar lebih fokus, terkoordinasi, dan profesional. Dengan pembagian peran yang jelas—BPKH pada pengelolaan dana haji dan kementerian baru pada aspek teknis penyelenggaraan—reformasi ini diharapkan meningkatkan kualitas layanan, transparansi, serta efisiensi, sekaligus memperkuat diplomasi dan kerja sama internasional demi menghadirkan sistem haji yang akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan jemaah.

**Nilai Manfaat Tahun 2025
Sudah Didistribusikan!**

BPKH sudah mendistribusikan nilai manfaat tahap pertama tahun 2025 untuk Jemaah Tunggu

Nilai manfaat dan saldo dana haji dapat di cek melalui BPKH Apps

Download BPKH Apps segera!

Google Play App Store



DELAPAN TAHUN BPKH DANA HAJI TERUS TUMBUH DAN BERI MANFAAT LEBIH BESAR

Delapan tahun perjalanan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi bukti komitmen dalam menjaga amanah dana umat. Mengusung tema Boosting Trust, Building The Future, BPKH memperingati Milad ke-8 di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis (12/12/2025), sebagai momentum refleksi sekaligus penegasan arah pengelolaan keuangan haji yang aman, efisien, dan berkelanjutan. Acara ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan perhajian, mulai dari perwakilan pemerintah, DPR RI, hingga mitra investasi dan kemaslahatan. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan kuatnya sinergi dalam ekosistem pengelolaan haji nasional.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah

menegaskan bahwa kepercayaan jemaah menjadi fondasi utama dalam setiap langkah BPKH.



“Pengelolaan dana haji kami jalankan secara transparan, akuntabel, dan hati-hati, sesuai prinsip syariah,” ujarnya.



PENANDATANGANAN KOMITMEN KINERJA BPKH TAHUN 2026

7 Badan Pelaksana BPKH & 13 Deputi BPKH



Bertumbuh dan Terjaga

Memasuki usia delapan tahun, BPKH mencatatkan berbagai capaian penting. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil diraih tujuh kali berturut-turut, mencerminkan konsistensi tata kelola yang sehat.

Dana kelolaan BPKH juga terus tumbuh. Pada 2025, nilainya diproyeksikan mendekati Rp179 triliun, meningkat signifikan dibandingkan awal pembentukan. Dari pengelolaan tersebut, BPKH menghasilkan nilai manfaat yang diperkirakan melampaui Rp12 triliun.

Tidak hanya dalam bentuk kinerja keuangan, manfaat pengelolaan dana haji juga dirasakan langsung oleh umat. Sejak 2018 hingga Oktober 2025, lebih dari Rp1,27 triliun telah disalurkan untuk berbagai program kemaslahatan, mulai dari dukungan penyelenggaraan haji, pendidikan dan dakwah, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial dan kebencanaan. Anggota Dewan Pengawas BPKH Rojikin menegaskan bahwa setiap

kebijakan pengelolaan dana haji diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan meringankan beban jemaah.

Menguatkan Peran dan Kolaborasi

Dalam pengelolaan investasi, BPKH menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan pengembangan nilai manfaat. Sebagian dana ditempatkan pada perbankan syariah untuk mendukung operasional haji, sementara sisanya

diinvestasikan pada berbagai instrumen syariah yang aman dan berkelanjutan.

BPKH juga memperkuat perannya di ekosistem haji global melalui BPKH Limited di Arab Saudi. Kehadiran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan jemaah sekaligus menghadirkan manfaat jangka panjang bagi pengelolaan dana haji Indonesia.

Fondasi untuk Langkah Selanjutnya

Ke depan, BPKH berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola, meningkatkan nilai manfaat, serta memperluas kolaborasi dan transformasi digital. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembiayaan haji di tengah dinamika dan tantangan yang terus berkembang.

“Delapan tahun ini adalah fondasi. Ke depan, BPKH akan terus menjaga amanah dana haji demi kemaslahatan jemaah dan umat,” tutup Fadlul.





KIPRAH BPKH DALAM KOMUNIKASI PUBLIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI

Kepercayaan publik tidak dibangun dalam satu momentum, melainkan melalui konsistensi sikap, kebijakan, dan komunikasi yang bertanggung jawab. Bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), transparansi dan keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan fondasi utama dalam menjaga amanah pengelolaan dana umat. Hal ini dibuktikan dengan raihan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dengan kualifikasi Informatif untuk kategori Badan Publik. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas pemenuhan standar keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan

tata kelola BPKH. Pada periode sebelumnya, BPKH masih berada dalam kategori Kurang Informatif.

Melalui pembenahan yang berkelanjutan, tahun 2025 menjadi momentum lompatan signifikan, di mana untuk pertama kalinya BPKH meraih predikat Badan Publik Informatif.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Jakarta, bersama sejumlah badan publik lain yang dinilai konsisten menerapkan prinsip transparansi dan

akuntabilitas dalam pelayanan informasi kepada masyarakat.

Konsistensi Membangun Tata Kelola yang Terbuka

Sebagai lembaga negara yang mengelola keuangan





dan ditingkatkan kualitasnya. Ke depan, BPKH menargetkan diri menjadi lembaga non-struktural terbaik dalam kualifikasi Informatif di tingkat nasional. “Predikat ini adalah amanah. Ke depan, BPKH berkomitmen meningkatkan kualitas transparansi dan layanan informasi publik agar dapat menjadi rujukan dan *role model* bagi lembaga non-struktural lainnya,” tambahnya.

haji, BPKH menempatkan keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari penerapan tata kelola yang baik (*good governance*). Dalam beberapa tahun terakhir, BPKH secara konsisten melakukan pembenahan sistemik, mulai dari penguatan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemutakhiran informasi berkala, hingga optimalisasi kanal digital agar akses informasi publik semakin mudah, cepat, dan akurat.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan bahwa capaian kualifikasi Informatif tahun 2025 merupakan hasil dari proses evaluasi dan pembenahan yang dilakukan secara menyeluruh.

“Kami menyadari bahwa pada tahun-tahun sebelumnya BPKH masih berada pada kategori Kurang Informatif. Karena itu, kami melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan budaya keterbukaan informasi. Alhamdulillah, tahun 2025 menjadi titik balik dengan diraihnya predikat Informatif,” ujar Fadlul.

Ia menambahkan bahwa predikat tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan amanah yang harus dijaga





MEWUJUDKAN TRANSFORMASI BMI SEBAGAI BANK HAJI: SEBUAH TINJAUAN KONSEPTUAL

Oleh: Prof. Dr. H.M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. *) & Dr. Aziz Fajar Ariwibowo, ST., MAB.**)

Dalam usianya kurang lebih delapan tahun, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang berdiri sejak tahun 2017 saat ini memiliki dua anak usaha yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) di Indonesia dan Syarikah BPKH Limited di Arab Saudi. Dua anak usaha tersebut bergerak pada sektor usaha yang berbeda yaitu BMI pada sektor jasa keuangan syariah sedangkan BPKH Limited pada sektor riil, namun bersama dengan BPKH keduanya saling terkait erat dan saling mendukung satu sama lain di dalam pengembangan ekonomi Ekosistem Haji dan Umrah (EHU). Sebagai institusi jasa keuangan syariah, BMI merupakan pondasi yang dapat mendorong percepatan bisnis EHU untuk lebih implementatif dan menciptakan manfaat ekonomi dengan skala yang lebih luas.

Secara historis kelahiran BMI pada tahun 1991 digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), para pengusaha muslim Indonesia, serta didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia saat itu (bankmuamalat.co.id). Mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, salah satu sumber modal BMI adalah dana wakaf masing-masing sebanyak Rp10 ribu dari 375.232 orang jemaah haji Indonesia tahun 1992 – 1994, selanjutnya pada tahun 2021 BPKH resmi menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP) BMI melalui kepemilikan saham

mayoritas saat ini sebanyak 82,69% (bankmuamalat.co.id). Dalam hubungan antara induk dengan anak usaha, terdapat keselarasan antara salah satu pernyataan misi BPKH yaitu mengembangkan peran strategis dalam ekosistem layanan perhajian dengan salah satu pernyataan misi BMI yaitu mendukung perkembangan ekonomi syariah, industri halal dan ekosistem haji menuju masyarakat madani (bpkh.go.id; bankmuamalat.co.id). Keempat hal tersebut tidak hanya menjadikan BMI sebagai bank pertama murni syariah namun juga memiliki values bawaan sebagai Bank Haji yang mengalir di dalam darah organisasi BMI. Tulisan ini mencoba untuk menerjemahkan secara konseptual transformasi apa saja yang perlu dilakukan oleh BMI untuk menjadi Bank Haji yang berkinerja unggul.

Definisi Bank Haji

Meskipun hingga saat ini belum terdapat definisi yang ajeg mengenai Bank Haji, namun secara sederhana Bank Haji dapat didefinisikan sebagai institusi keuangan Islam yang mengelola dana haji yang dikumpulkan oleh Pemerintah ratusan triliun setiap tahunnya, memiliki potensi ekonomi, serta apabila dikelola secara optimal akan berdampak pada kesejahteraan jemaah haji Indonesia (Nazri, 2013). Namun demikian, Bank Haji sesungguhnya bukan hanya sekedar bank syariah atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh BPKH sebagai Bank

Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih), lebih dari itu Bank Haji merupakan orkestrator layanan dan transaksi keuangan *end-to-end* sejak pra hingga pasca ibadah haji dan umrah meliputi antara lain perencanaan, pendaftaran, pengelolaan dana, keberangkatan, pelaksanaan ibadah, kepulangan, hingga pembayaran dan penyelesaian transaksi lintas negara. Tidak hanya itu, Bank Haji juga berperan sebagai integrator atas sistem teknologi publik yang saling terkoneksi dan menjadi *backbone* di sepanjang *value chain* EHU baik di Indonesia maupun di Arab Saudi sehingga masyarakat dan jemaah haji dan umrah dapat mengaksesnya hanya dengan satu sentuhan pada aplikasi *mobile banking*.

Karakteristik Bank Haji juga berbeda apabila dibandingkan dengan Bank Umum Syariah (BUS) ataupun bank konvensional lainnya. Pertama, Bank Haji fokus melayani jasa dan transaksi keuangan utamanya pada ekosistem haji dan umrah, sedangkan BUS dan bank konvensional melayani segmen masyarakat dan ekosistem bisnis yang lebih luas. Kedua, Bank Haji mengintegrasikan seluruh kluster bisnis dalam ekosistem haji dan umrah menjadi satu kesatuan layanan yang saling terhubung satu sama lain. Dua karakter utama tersebut merepresentasikan Bank Haji sebagai *boundary spanning bank* yang menghubungkan, mengoordinasikan, menyelaraskan, mengintegrasikan, serta berinteraksi secara intensif dengan lingkungan eksternalnya di dalam EHU (Ariwibowo, 2025).

Alur Perjalanan Jemaah Haji dan Umrah

Tahapan-tahapan dari perjalanan Jemaah Haji dan Umrah adalah dimulai dari membuka tabungan untuk biaya haji dan umrah di BPS Bipih serta mendaftar porsi haji di Kementerian Haji dan Umrah. Selanjutnya menunggu jadwal keberangkatan haji sesuai antrian (*waiting list*), memilih Perusahaan Ibadah Haji Khusus (PIHK)/Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)/Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah (PPIU), serta melaksanakan pelunasan Bipih dan biaya umrah. Kemudian melaksanakan keberangkatan ibadah haji dan umrah yang melibatkan proses perjalanan dari domisili tempat tinggal menuju lokasi embarkasi, kemudian menuju bandara keberangkatan di Indonesia dan bandara kedatangan di Arab Saudi, dan menuju ke lokasi penginapan jemaah haji dan umrah baik di Jeddah, Makkah, maupun Medinah. Setelah pelaksanaan ibadah haji dan umrah selesai maka jemaah akan melaksanakan perjalanan

kembali ke tanah air melewati tahapan yang sama dengan keberangkatan namun dengan urutan yang berkebalikan.

Pada sepanjang proses perjalanan ibadah haji dan umrah tersebut akan melibatkan beragam peluang bisnis dan juga berbagai pemangku kepentingan pada kluster-kluster di dalam EHU. Beberapa pemangku kepentingan dimaksud antara lain adalah layanan transaksi keuangan dari BPS Bipih, Kementerian Haji dan Umrah, KBIH, PIHK, PPIU, BPKH, pengusaha transportasi darat/kereta api & kereta cepat/kapal laut/pesawat udara, hotel/embarkasi, katering, maskapai pesawat terbang, perlengkapan haji dan umrah, asuransi syariah, layanan komunikasi, logistik, tour & travel, souvenir haji dan umrah, *cargo handling*, layanan keimigrasian, layanan *healthcare*, dan layanan bea cukai.

Bank Haji sebaiknya perlu memetakan, mengorkestrasi, dan mengintegrasikan seluruh tahapan, peluang bisnis, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam EHU, sehingga seluruh pihak dapat memperoleh akses dan layanan yang sama dan standar mulai dari pembiayaan *wholesale/middle/retail/consumer*; tabungan dan pembayaran melalui kartu maupun mobile; informasi haji dan umrah termasuk pendaftaran porsi haji, antrian keberangkatan haji, *virtual account*, tour & travel, KBIH, PIHK, dan PPIU; kesehatan terpadu sejak vaksin, database kesehatan, hingga koneksi virtual dengan gelang jemaah; belanja grosir untuk souvenir dan oleh-oleh; keimigrasian seperti paspor dan visa; pemesanan dan pembelian tiket penerbangan, kapal laut, kereta cepat, bus, ijin tasrikh, ijin masuk raudhah, pengiriman kargo, hotel, dan restoran; serta pembayaran denda DAM, pembelian kambing, pemilihan lokasi penyembelihan, pengolahan daging menjadi kemasan maupun kaleng, dan distribusi daging DAM.

Mengembangkan dan Memperkuat Kapabilitas BMI sebagai Bank Haji

Berangkat dari kapabilitas BMI eksisting sebagai salah satu BUS dan sekaligus BPS Bipih, maka secara konseptual telah disusun arsitektur 12 *building blocks* kapabilitas yang harus dikembangkan dan dikuatkan oleh BMI agar dapat bertransformasi sebagai Bank Haji. Arsitektur 12 *building blocks* kapabilitas Bank Haji tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar yaitu *front office*, *hub & ecosystem*, dan *back office*.

Kelompok pertama yaitu lapisan *back office* merupakan *core functions block* sebagai pondasi dan dasar bagi seluruh operasional BMI dan berfungsi untuk mengelola *core banking system*, *strategi bank*, tata kelola, kepatuhan, manajemen risiko, *data warehouse*, *data security*, kesiapan sumber daya, dan kolaborasi strategis antar fungsi. Di atas *core functions block* tersebut, terdapat enam *blocks* pilar layanan dan produk utama yang seluruhnya harus disediakan dan dikelola dengan baik oleh BMI antara lain terkait *funding*, *consumer financing*, *business ecosystem financing*, *transactional*, *wealth*, serta *insurance*. Salah satu layanan utama yang perlu dikembangkan oleh BMI adalah *foreign exchange* antara tiga mata uang yang banyak digunakan selama proses pelaksanaan ibadah haji dan umrah yaitu Indonesia Rupiah (IDR), Saudi Arabia Riyal (SAR), dan United States Dollar (USD), yang dapat diakses oleh seluruh jemaah haji dan umrah melalui Kartu Haji Indonesia, e-wallet, maupun mobile banking BMI yaitu Mumalat Digital Islamic Network (MDIN).

Kemudian kelompok kedua yaitu lapisan *hub & ecosystem* berada di tengah-tengah dan menghubungkan antara lapisan *back office* dan *front office*, merupakan fungsi manajerial dan *strategic business acumen* bagi BMI dimana *outputs* yang dihasilkan menjadi rujukan tidak hanya bagi aktivitas operasional namun juga arah bagi pertumbuhan bisnis BMI ke depan yang menguntungkan. Salah satu kapabilitas kritical yang harus dimiliki oleh BMI adalah penyediaan akses yang mengintegrasikan sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) yang mengelola seluruh aspek penyelenggaraan haji mulai dari pendaftaran, pembayaran, penjadwalan, pelunasan dan pembatalan (kemenag.go.id), dengan sistem keuangan haji terpadu (Siskehat) yang mengelola seluruh informasi mengenai pengelolaan keuangan haji mulai dari penerimaan setoran awal, investasi, penempatan dana, catatan aset keuangan BPKH,

serta informasi terkait pemberian nilai manfaat yang dibagikan kepada jemaah haji tunggu melalui virtual account (bpkh.go.id). Tidak hanya itu, lapisan *hub & ecosystem* merupakan pembeda atau diferensiasi bahkan *core competency* BMI jika dibandingkan dengan BUS atau bank konvensional lainnya, yaitu tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan namun juga sebagai orkestrator EHU lintas sektor meliputi koordinasi, integrasi, dan sinergi antar sembilan klaster bisnis EHU yaitu klaster jasa keuangan syariah sebagai pondasi untuk sektor riil, klaster kesehatan lansia atau *elder healthcare*, klaster *tour & travel* dan keimigrasian, klaster *hospitality*, klaster belanja ritel, klaster logistik kargo haji & umrah dan transportasi pesawat, bus & kereta cepat, lalu klaster *property/real estate*, kemudian klaster *katering*, pengolahan makanan siap saji dan siap makan serta pengelolaan denda DAM secara digital, serta klaster teknologi informasi (Ariwibowo, 2025).

Pada lapisan *hub & ecosystem*, sangat penting bagi BMI untuk langsung terlibat secara aktif di dalam *ecosystem orchestration*, yaitu rangkaian proses untuk mengelola, menyelaraskan, dan memfasilitasi aktivitas para multi pemangku kepentingan yang kompleks dalam rangka mengembangkan nilai-nilai di dalam EHU (Cennamo et al., 2022; Shen et al., 2024). Menurut Shen et al., 2024, BMI sebagai *ecosystem orchestrator* perlu melengkapi kapabilitasnya dengan lima praktik utama yaitu mendesain ekosistem beserta aturan mainnya, membangun dan memelihara hubungan antar pemangku kepentingan, mengintegrasikan sumber daya dari berbagai pihak terkait, mendorong penggunaan teknologi sebagai enablers, serta membangun budaya dan kolaborasi inovasi di dalam EHU.

Kelompok ketiga yaitu



front office merupakan area paling atas sebagai lokasi dimana terjadi persinggungan langsung antara BMI dengan jemaah haji dan umrah atau disebut sebagai *customer touchpoint* sehingga tidak hanya membutuhkan dukungan digital interface yang halus, standar, terintegrasi, dan konsisten, namun juga kanal distribusi secara fisik yang telah disesuaikan dengan segmen masyarakat yang dilayani yaitu jemaah haji dan umrah. Area *front office* ini menjadi sangat kritis untuk dijaga standar kualitas, layanan, dan *service level agreement* (SLA) karena berhubungan dengan *customer experiences* yang dirasakan oleh jemaah haji dan umrah Indonesia selama menggunakan layanan EHU terintegrasi yang disediakan oleh BMI.

Di antara ketiga kelompok besar tersebut terdapat dua penopang vertikal sebagai kolaborasi strategis antar seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan EHU baik di Indonesia maupun di Arab Saudi termasuk seluruh KBIH/PIHK/PPIU yang diorkestrasikan dan dikoordinasikan oleh BMI. Selain itu, meskipun saat ini BMI telah mempunyai jaringan internasional berupa kantor cabang di Kuala Lumpur Malaysia serta kerja sama jaringan ATM dengan Bank Al Rajhi di Arab Saudi, namun BMI perlu mempertimbangkan ke depannya untuk membuka kantor representatif di Arab Saudi. Sebagai *global hub and investment*, jaringan cabang BMI di luar negeri tersebut memainkan peran strategis karena terhubung dengan jaringan keuangan internasional, membuka akses pada instrumen investasi syariah global, memfasilitasi transaksi perdagangan internasional, mengelola risiko *islamic hedging* dari transaksi *foreign exchange*, serta menyediakan solusi pembayaran lintas negara khususnya antara IDR, SAR, dan USD.

Keunggulan Arsitektur 12 Building Blocks untuk Transformasi BMI Menjadi Bank Haji

Arsitektur Bank Haji yang terbagi menjadi tiga kelompok lapisan bertujuan untuk memastikan adanya pemisahan tugas dan fungsi pada masing-masing lapisan sehingga lebih mudah untuk dilakukan evaluasi dan peningkatan kapabilitas bahkan akan lebih mudah pula apabila terdapat rencana pengembangan untuk skala yang lebih luas dan lebih besar. Konseptualisasi arsitektur 12 *Building Blocks* Bank Haji merupakan pendekatan holistik yang visioner dan komprehensif namun tetap realistis, sehingga ke depannya BMI diharapkan memiliki kapabilitas jauh melampaui fungsi BUS dan perbankan konvensional karena mampu

mengorkestrasikan dan mengkoordinasikan seluruh aspek di dalam EHU yang terintegrasi. Pendekatan integrasi EHU tersebut sesungguhnya tidak hanya mewakili perjalanan Jemaah haji dan umrah sejak pendaftaran, keberangkatan, pelaksanaan, hingga kepulangan, namun juga menghubungkan klaster-klaster bisnis di dalam EHU antara lain transportasi seperti booking tiket pesawat dan kereta cepat Saudi Arabia Railways, *hospitality* seperti booking kamar hotel dan restoran, layanan kargo jemaah, dan *property*, kemudian melibatkan multi pemangku kepentingan lintas negara dan lintas geografis, serta menyediakan *digital fronting channel* sebagai satu pintu bagi seluruh layanan terkait EHU yang mudah diakses oleh seluruh Jemaah haji dan umrah melalui MDIN BMI.

Dengan mengimplementasikan arsitektur ini, BMI sebagai salah satu anak usaha BPKH sekaligus sebagai *boundary spanning bank dan ecosystem orchestrator* yang mengintegrasikan layanan keuangan dan investasi syariahnya dengan seluruh bisnis yang membentuk EHU akan memberikan manfaat berlipat tidak hanya mengoptimalkan dana haji yang dikelola oleh BPKH namun juga memberdayakan pelaku usaha dalam EHU, berkontribusi pada pembangunan ekonomi syariah nasional, serta ikut mendorong penguatan posisi Indonesia sebagai salah satu pusat industri dan ekonomi halal di dunia.

**) Anggota Badan Pelaksana BPKH RI Bidang Investasi Langsung dan Lainnya, Perencanaan, Riset dan Pengembangan Periode 2022–2027 dan Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.*

***) Kepala Divisi Manajemen Portofolio Investasi Langsung dan Investasi Lainnya BPKH serta Anggota Indonesia Strategic Management Society (ISMS).*

*Istern
Myara
Sidik*

AK, CMA, CA, MM, QIA

MENGHIDUPKAN “RAKSASA TIDUR” EKONOMI HAJI

BPKH SIAPKAN STRATEGI HAJJ DIGITAL NERVOUS SYSTEM

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem haji-umrah nasional melalui integrasi teknologi, penguatan tata kelola syariah, serta optimalisasi arus ekonomi umat yang selama ini belum terhubung secara menyeluruh. Komitmen ini disampaikan dalam Indonesia Investment Insight Forum 2025 di Ayana Midplaza Jakarta, melalui gagasan besar “Momentum Baru Ekosistem Haji-Umrah dan Transformasi Investasi Syariah” yang menempatkan BPKH sebagai penghubung utama (anchor institution) bagi stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan dana haji. Acara dihadiri Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan dan Harry Alexander.

Dalam paparannya Anggota Dewan Pengawas BPKH Heru Muara Sidik menyoroti besarnya arus ekonomi terkait haji-umrah yang disebut mencapai hampir Rp100 triliun per tahun, namun masih terfragmentasi karena pelaku ekosistem (maskapai, hotel, transportasi, dan layanan pendukung) berjalan sendiri-sendiri. Melalui pendekatan “*Hajj Digital Nervous System*”, BPKH mendorong terbentuknya peta besar ekosistem yang saling terhubung berbasis data dan layanan terintegrasi, sehingga manfaat ekonomi dan layanan jamaah dapat dikelola lebih efektif, transparan, dan berdaya tahan. “Ekonomi haji adalah ‘raksasa tidur’ yang selama ini bergerak secara sunyi; melalui *Hajj Digital Nervous System*, kami ingin menyatukan sungai-sungai ekonomi yang terpisah ini menjadi satu arus besar yang kuat. Kami tidak hadir untuk mendisrupsi pelaku bisnis yang sudah ada, melainkan menjadi mitra strategis yang menyediakan platform agar mereka bisa tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel,” ujar Heru Muara Sidik.

Fokus Strategis: Sukuk dan Emas

BPKH juga menekankan pentingnya

pendalaman pasar sukuk, termasuk kebutuhan transparansi harga, penguatan pasar sekunder, serta ketersediaan benchmark dan yield curve sukuk agar investor memperoleh kepastian dan likuiditas pasar meningkat. Dalam konteks tersebut, peran lembaga penetapan harga dan pelaku pasar (dealer utama) dinilai krusial, sementara BPKH—dengan kekuatan asetnya—diposisikan sebagai “penjaga gravitasi pasar” yang membantu stabilitas.

Selain sukuk, BPKH melihat diversifikasi melalui instrumen emas sebagai strategi ketahanan portofolio jangka panjang, seiring terbukanya peluang transaksi emas yang legal, terawasi, dan sesuai prinsip syariah. BPKH memaparkan opsi implementasi, mulai dari emas fisik bersertifikat, rekening emas wholesale, hingga skema kemitraan (joint venture) untuk pengembangan trading desk, dengan arah penguatan ketahanan nilai dana umat.

Anggota Dewan Pengawas BPKH Heru Muara Sidik menegaskan bahwa penguatan ekosistem harus selalu bertumpu pada amanah, kehati-hatian, dan tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan. “Yang sedang dibangun bukan sekadar penguatan portofolio, tetapi penguatan sistem yang menjaga amanah dana umat—melalui integrasi data, tata kelola syariah yang kuat, dan kolaborasi ekosistem—agar keberlanjutan layanan haji-umrah dan stabilitas pengelolaan dana haji makin kokoh,” ujar Heru Muara Sidik.

Arah Ke Depan: Hajj Financial Intelligence Hub

Ke depan, BPKH mendorong terbentuknya “*Hajj Financial Intelligence Hub*”, yakni integrasi tiga pilar: digitalisasi haji, pendalaman pasar sukuk, dan diversifikasi emas dalam satu pusat kecerdasan data dan pengambilan keputusan. Gagasan ini diarahkan untuk memperkuat layanan bagi jamaah Indonesia sekaligus membuka peluang Indonesia tampil sebagai pusat gravitasi keuangan syariah dunia melalui inovasi instrumen, integrasi data, dan tata kelola yang unggul.



GREEN WAKAF: PERKUAT EKOSISTEM LINGKUNGAN DAN EKONOMI UMAT



Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara resmi mengimplementasikan Program Wakaf Pohon di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen BPKH dalam mengoptimalkan nilai manfaat dana haji melalui skema kemaslahatan umat yang berfokus pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Dalam program ini, BPKH menyalurkan sebanyak

712 bibit pohon yang terdiri dari varietas produktif dan konservatif, antara lain alpukat, durian, gayam, nangka, aren, kelapa, dan bambu. Pemilihan jenis pohon ini bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat melalui hasil panen, sekaligus berfungsi sebagai penguat ekosistem lokal.

Keberlanjutan Program Nasional

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Sulistyowati, menjelaskan bahwa inisiatif di Gunung Kidul merupakan bagian dari rangkaian program penghijauan nasional yang telah dijalankan BPKH di berbagai wilayah Indonesia.

“Sebelumnya, program serupa telah sukses dilaksanakan di Sumatera Barat (1.100 bibit), Bogor (2.500 bibit), serta Majalengka (1.000 bibit). Kehadiran kami di Gunung Kidul hari ini adalah bentuk konsistensi BPKH dalam menjaga amanah jemaah untuk memberi manfaat bagi bumi dan sesama,” ujar Sulistyowati.





Program ini mengusung konsep dwifungsi. Selain berfungsi secara ekologis, pohon-pohon yang ditanam diproyeksikan menjadi sumber pendapatan alternatif bagi warga di masa depan.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Harry Alexander, menekankan pentingnya aspek pemanfaatan jangka panjang. “Kami berharap pohon-pohon ini tidak hanya menjadi penyerap karbon dan penguat daerah tangkapan air guna mencegah bencana, tetapi juga menjadi aset produktif yang mampu menghasilkan income bagi masyarakat sekitar,” ungkapny.

Sinergi Strategis dengan Muhammadiyah

Pelaksanaan program di Gunung Kidul dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan PP Muhammadiyah.

Penanaman dilakukan di atas tanah wakaf milik organisasi tersebut, dengan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah sebagai penerima manfaat utama. Untuk menjamin keberlangsungan bibit, perawatan rutin akan dikelola langsung oleh Pimpinan Cabang dan Ranting Muhammadiyah setempat.

Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, Azrul Tanjung, memberikan apresiasinya terhadap kolaborasi ini. Ia menyebut program ini sebagai bentuk “Investasi Akhirat”. “Melalui BPKH, program wakaf ini menjadi amal jariyah yang pahalanya akan

terus mengalir bagi para jemaah haji Indonesia seiring dengan tumbuhnya pohon-pohon ini,” tuturnya.

Melalui sinergi ini, BPKH berharap dana haji yang dikelola secara profesional dapat terus memberikan dampak positif yang nyata (multiplier effect) bagi kesejahteraan umat dan kelestarian alam di seluruh penjuru Indonesia.



PERPUSTAKAAN MASJIDIL HARAM: WARISAN PERADABAN ISLAM

Di tengah kesakralan Masjidil Haram, tempat jutaan umat Islam dari seluruh dunia menunaikan ibadah, tersimpan sebuah pusat ilmu pengetahuan yang menjadi saksi panjang peradaban Islam: Perpustakaan Masjidil Haram. Lebih dari sekadar ruang baca, perpustakaan ini merupakan penjaga warisan keilmuan, pusat dakwah, serta gerbang literasi global yang memperkaya pengalaman spiritual dan

intelektual para jamaah.

Perpustakaan Masjidil Haram saat ini berlokasi di lantai dua perluasan King Fahd—rahimahullah—dengan luas lebih dari 800 meter persegi. Perpustakaan ini dirancang modern dan inklusif, menyediakan layanan bagi penyandang disabilitas, layanan informasi, penelusuran buku digital, rekaman audio (khutbah, kajian, dan tilawah),

hingga layanan fotokopi mandiri. Kehadirannya memperkuat misi ilmiah dan dakwah Dua Tanah Suci sebagai bagian dari sistem terpadu bimbingan, edukasi, dan penyuluhan bagi para pengunjung Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Dari Amanah Kepemimpinan hingga Pelayanan Umat

Perpustakaan ini didirikan atas perintah Ketua Umum Urusan Masjidil Haram saat itu, Sheikh Prof. Dr. Abdulrahman bin Abdulaziz Al-Sudais, dan diresmikan oleh Pangeran Khalid Al-Faisal, Gubernur Wilayah Makkah, pada Sabtu, 22 Rajab 1434 H. Kini, perpustakaan berada di bawah naungan Badan Kepresidenan Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Perpustakaan Masjidil Haram memiliki ruang baca, perpustakaan audio, perpustakaan digital, serta



fasilitas komputer, dan melayani pengunjung selama 24 jam penuh. Hal ini menegaskan komitmen otoritas Dua Tanah Suci dalam menghadirkan layanan ilmu yang mudah diakses oleh jamaah, peneliti, dan penuntut ilmu dari berbagai belahan dunia.

Sheikh Dr. Abdulrahman Al-Sudais secara khusus mengarahkan pengelola perpustakaan untuk mengembangkan sistem kerja, berinvestasi pada teknologi, menerbitkan buku digital, serta memanfaatkan media baru guna memperluas akses terhadap manuskrip langka dan koleksi berharga. Upaya ini bertujuan memperluas dampak pesan keagamaan Islam sekaligus menegaskan peran global Kerajaan Arab Saudi dalam kepemimpinan peradaban.

Jejak Sejarah Panjang Sejak Abad ke-2 Hijriah

Perpustakaan Masjidil Haram merupakan salah satu

perpustakaan tertua dan terpenting di dunia Islam. Akar sejarahnya bermula pada tahun 161 H, ketika Khalifah Abbasiyah Muhammad Al-Mahdi memerintahkan pembangunan dua kubah di area mataf: satu untuk penyediaan air dan makanan jamaah, dan satu lagi untuk menyimpan manuskrip Al-Qur'an dan kitab-kitab keagamaan. Kubah ini dikenal sebagai Qubbah Bait Al-Mahfuzhat, yang menjadi cikal bakal perpustakaan Masjidil Haram. Perpustakaan ini juga menyimpan lebih dari 7.800 manuskrip asli, ribuan salinan, serta ratusan indeks dan manuskrip non-Arab. Manuskrip-manuskrip ini menjadi bukti kekayaan intelektual Islam yang terus dijaga lintas generasi.

Sejak masa itu, Makkah berkembang sebagai pusat keilmuan global. Pada era Kerajaan Arab Saudi, perhatian terhadap pengembangan ilmu semakin menguat. Pada tahun

1357 H (1938 M), Raja Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud menetapkan nama resminya sebagai Perpustakaan Masjidil Haram di Makkah. Pengembangan berlanjut hingga masa Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, dengan berbagai pencapaian nyata, termasuk pemindahan dan pemantapan lokasi perpustakaan di Bathaa Quraish untuk melayani jamaah, peneliti, dan penuntut ilmu secara lebih optimal.



RENCANA PERJALANAN HAJI

Tahun 1447 H/2026 M

21 April 2026

4 Dzulq'adah 1447

Jemaah Haji masuk asrama haji

22 April – 6 Mei 2026

5 – 19 Dzulq'adah 1447

Pemberangkatan Jemaah Haji Gel. 1 dari Tanah Air ke Madinah

1 – 15 Mei 2026

14 – 28 Dzulq'adah 1447

Pemberangkatan Jemaah Haji Gel. 1 dari Tanah Air ke Madinah

7 – 21 Mei 2026

21 Dzulq'adah – 4 Dzulhijjah 1447

Pemberangkatan Jemaah Haji Gel. 2 dari Tanah Air ke Jeddah

16 Juni 2026

1 Muharram 1448

Tahun Baru Hijriyah 1448

26 Mei 2026

9 Dzulhijjah 1447

Wukuf di Arafah

21 Mei 2026

4 Dzulhijjah 1447

Closing Date (24.00 WAS)

27 Mei 2026

10 Dzulhijjah 1447

Idhul Adha 1447 H

1 Juni 2026

15 Dzulhijjah 1447

Awal kedatangan Jemaah Haji Gel. 1 di Tanah Air

16 Juni – 1 Juli 2026

1 – 16 Muharram 1448

Kedatangan Jemaah Haji Gel. 2 di Tanah Air

1 – 15 Juni 2026

15 – 29 Dzulhijjah 1447

Pemulangan Jemaah Haji Gel. 1 ke Tanah Air

7 – 30 Juni 2026

15 Dzulhijjah 1447

Pemulangan Jemaah Haji Gel. 2 ke Tanah Air

27 – 29 Mei 2026

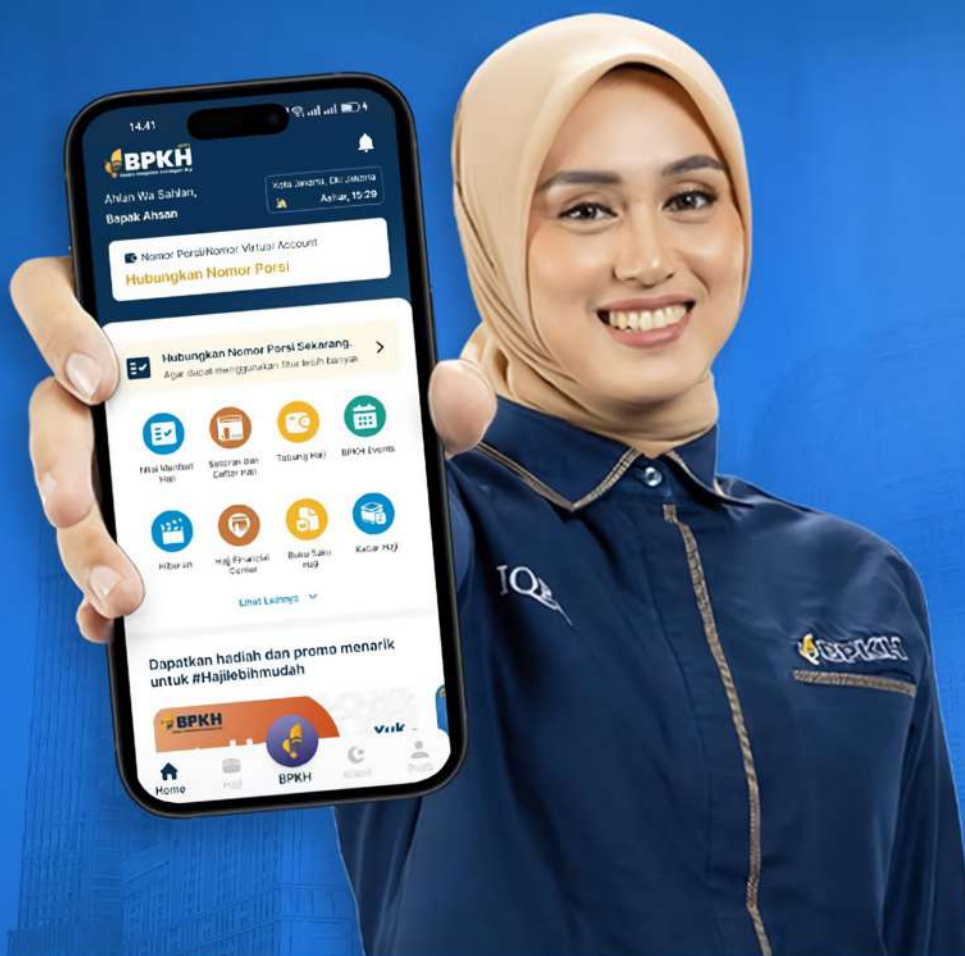
11 – 13 Dzulhijjah 1447

Hari Tasriq 1

Hari Tasriq 2 (Nafar awal)

Hari Tasriq 3 (Nafar Tsani)

source: haji.go.id/galeri/infografis



Mau Tahu Estimasi Keberangkatanmu?

Cek estimasi keberangkatan dan nilai manfaat langsung di BPKH Apps.
Satu aplikasi untuk kelola rencana ibadah haji dengan mudah dan transparan.

BPKH Apps



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940